

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arah dan ciri pembangunan pada masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga tahun 1998 adalah peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Demikian pula di bidang pendidikan dan kebudayaan yaitu dalam meningkatkan mutu dan meratakan pendidikan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Orde Baru membangun lembaga-lembaga pendidikan mulai di kota-kota maupun di desa-desa.¹ Pendidikan pada masa ini dijadikan sebagai salah satu sektor utama untuk menyokong pembangunan ekonomi masyarakat.²

Pada dasarnya Repelita III (1979-1984) merupakan kelanjutan Repelita II (1974-1979) dengan sekaligus memperluas sejumlah kegiatan. Hasil-hasil positif yang telah dicapai dalam Repelita II terciplah keadaan untuk memulai Repelita III dalam pembangunan pendidikan dan pengembangan generasi muda. Beberapa program Repelita III di antaranya ialah: usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar dilakukan dengan jalan pembangunan gedung-gedung sekolah baru dengan memperhatikan penyebaran lokasinya; penambahan ruang-ruang kelas baru pada

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan*, 1977, hml. 32.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Profil SMA: Sekolah Menengah Atas, Dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2017), hlm. 38.

sekolah-sekolah yang ada; dan sekaligus memperbaiki gedung-gedung sekolah untuk lebih memantapkan kesempatan pendidikan yang sudah tersedia.³

Salah satu SMA yang didirikan pada Repelita III adalah SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. Kehadiran SMA ini merupakan salah satu bentuk pemerataan pendidikan di Kabupaten Agam khususnya dan Sumatera Barat umumnya. SMA Negeri 1 Tilatang Kamang merupakan sekolah menengah umum yang terletak di Pekan Kamis, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang. Pada awalnya sekolah ini merupakan filial atau Kelas Jauh (KJ) dari SMA Negeri 1 Bukittinggi berdasarkan pada SK. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5921/108.1/1B/1982 tanggal 28 Mei 1982.⁴

Pendirian SMA filial Tilatang Kamang pada awalnya merupakan inisiatif masyarakat setempat. Beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Tilatang Kamang mendirikan sekolah ini, antara lain: banyaknya lulusan SMP di Kecamatan Tilatang Kamang tidak dapat diterima oleh beberapa SLTA di Bukittinggi karena adanya batasan penerimaan murid dari luar kota Bukittinggi; membutuhkan biaya yang besar dan jarak tempuh yang jauh untuk bersekolah di Bukittinggi; serta tingginya keinginan atau kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak-anaknya. Pada masa itu SMA hanya ada di daerah Bukittinggi yang berjarak lebih kurang 10 km dari Kecamatan Tilatang Kamang.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Lima Repelita Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pusbuk, 1990), hlm. 111.

⁴ *Arsip SMA Negeri 1 Tilatang Kamang*.

Alasan di atas menjadi pendorong bagi tokoh pemerhati pendidikan dan masyarakat di Tilatang Kamang untuk mendirikan sebuah SMA. Oleh karena itu dibentuklah Yayasan Pendidikan Tuanku Nan Renceh dan disingkat dengan Yayasan Tuanku Nan Renceh dengan Akta Notaris Nomor 58 tanggal 21 Januari 1978.⁵ Yayasan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Kecamatan Tilatang Kamang khususnya. Setelah Yayasan Tuanku Nan Renceh berdiri, maka diajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Urang Sepuluh Tilatang Kamang untuk menggunakan tanah adat seluas sekitar satu hektar.

Pada tahun 1980 dibentuk Panitia Perencana Pembangunan SMA Tilatang Kamang. Susunan panitia itu ialah: Raismar Gani (ketua); Yohanes (sekretaris); dan Mansur Kasim, S.H. (pembantu umum dan pelaksana tugas). Seiring dengan itu, dilakukan penerimaan murid. Mansur Kasim, S.H. ditunjuk oleh Kepala Depdikbud Kabupaten Agam saat itu sebagai kepala sekolah.⁶ Oleh karena gadungnya masih sedang dibangun maka proses belajar mengajar sekolah ini dititipkan di SMA Negeri 1 Bukittinggi.

Pada tahun berikutnya setelah tujuh lokal sekolah selesai dibangun, maka siswa yang berasal dari Tilatang Kamang sebanyak 200 orang mulai menempati lokal tersebut. Mereka tidak lagi belajar di SMA Negeri 1 Bukittinggi. Lokal ini dibangun atas swadaya masyarakat.⁷ Para donatur utama yang menyumbang untuk

⁵ Akta Notaris Yayasan Tuanku Nan Renceh.

⁶ *Arsip* Pribadi H. Mansur Kasim, S.H. salah satu anggota panitia pembangunan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang sekaligus menjadi kepala sekolah yang pertama.

⁷ *Ibid.*

pembangunan sekolah ini ialah Prof. dr. H. Ilyas Dt. Batuah yang saat itu sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, H. Hasoeda pemilik usaha rumah makan Roda, dan H. Bakar pemilik CV. Andalas.⁸

Pada tahun 1983 keberadaan SMA Tilatang Kamang diakui oleh pemerintah berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMA pada bulan November 1983 Nomor 473/0/1983. Selain itu ditetapkan pula bahwa SMA Tilatang Kamang lepas dari SMA Negeri 1 Bukittinggi.

Prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 1 Tilatang Kamang menjadikan sekolah ini berkembang. SMA ini pernah menjadi SMA induk filial untuk tiga SMA lainnya, yaitu SMA Negeri 1 Palupuh tahun 1996, SMA Negeri 1 Kamang Magek tahun 1999, dan SMA Negeri 2 Tilatang Kamang tahun 2002. Keberadaan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang sebagai sekolah induk bagi tiga sekolah tersebut, seiring dengan pemekaran Kecamatan Tilatang Kamang. Pemekaran wilayah tersebut menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Kamang Magek sehingga setiap kecamatan harus memiliki SMA untuk dapat meratakan pendidikan bagi masyarakat.

Dengan demikian dilihat dari kondisi sekarang, SMA Negeri 1 Tilatang Kamang merupakan salah satu diantara 26 SMA negeri di Kabupaten Agam. Bila

⁸ *Ibid.*

dibandingkan dengan jumlah SMA di seluruh wilayah Sumatera Barat ialah sebanyak 285 sekolah.⁹

Prestasi lainnya yang dicapai oleh SMA Negeri 1 Tilatang Kamang diantaranya ialah pada bulan November 2011 SMA Negeri 1 Tilatang Kamang memperoleh akreditasi A sampai sekarang. Pada tahun 1985/1986 nilai Ebtanas SMA Negeri 1 Tilatang Kamang lebih tinggi dari SMA Negeri 1 Bukittinggi. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 SMA Negeri 1 Tilatang Kamang telah mendapat empat kali juara dalam Lomba Sekolah Sehat dan dua kali mendapat juara pada lomba Sekolah Adiwiyata. Pencapaian prestasi ini dilakukan atas usaha keras dan kerjasama yang baik dari kepala sekolah, majlis guru, para murid, dan dukungan masyarakat setempat.

SMA Negeri 1 Tilatang Kamang ini penting untuk diteliti karena belum ada yang menulis secara khusus tentang SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. Sekolah ini juga menarik untuk diteliti karena sekolah ini berawal dari status filial SMA Negeri 1 Bukittinggi. Lalu setelah mandiri dan berkembang sekolah ini menjadi sekolah induk bagi SMA Negeri 1 Palupuh, SMA Negeri 1 Kamang Magek, dan SMA Negeri 2 Tilatang Kamang. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul **“SMA Negeri 1 Tilatang Kamang: Dari Sekolah Filial Sampai Menjadi Sekolah Rujukan Tahun 1982-2019”**.

⁹ <https://referensi.data.kemendikbud.go.id> Diakses Pada tanggal 24 Desember 2021.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Penelitian ini memusatkan perhatian terhadap perkembangan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang Kabupaten Agam dari tahun 1982 sampai tahun 2019. Batasan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu batasan spasial dan batasan temporal agar lebih mengarah pada pokok permasalahan penelitian. Batasan spasial dari tulisan ini ialah Kecamatan Tilatang Kamang baik sebelum terjadinya pemekaran wilayah maupun sesudahnya, karena SMA Negeri 1 Tilatang Kamang berada di daerah Kecamatan Tilatang Kamang.

Batasan temporal dari penelitian ini ialah tahun 1982 sampai 2019. Tahun 1982 sebagai batasan awal kajian ini karena pada tahun tersebut SMA Negeri 1 Tilatang Kamang mulai berdiri, dan batasan akhirnya pada tahun 2019 karena akhir tahun itu Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada dunia pendidikan. Hampir seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui daring termasuk SMA Negeri 1 Tilatang Kamang.

Untuk lebih memperjelas penelitian maka dirumuskan beberapa aspek permasalahan antara lain:

1. Mengapa masyarakat Tilatang Kamang dan Yayasan Tuanku Nan Renceh menggagas pendirian SMA Negeri 1 Tilatang Kamang?
2. Bagaimana perkembangan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang sejak menjadi filial SMA Negeri 1 Bukittinggi sampai menjadi sekolah induk bagi SMA lainnya?

3. Bagaimana strategi pimpinan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang dan majelis guru untuk memajukan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan alasan masyarakat Tilatang Kamang dan Yayasan Tuanku Nan Renceh menggagas pendirian SMA Negeri 1 Tilatang Kamang.
2. Memaparkan perkembangan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang sejak menjadi filial SMA Negeri 1 Bukittinggi sampai menjadi sekolah induk bagi SMA lainnya.
3. Menjelaskan strategi pimpinan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang dan majelis guru untuk memajukan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sejarah perkembangan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. Disamping itu dapat menambah bacaan sejarah mengenai lembaga pendidikan menengah di Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian sejarah pendidikan sudah banyak dilakukan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Ada beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

berjudul “Profil SMA: Sekolah Menengah Atas dari Masa ke Masa”.¹⁰ Buku ini menerangkan tentang keadaan kebijakan dan sistem pendidikan sekolah menengah atas, mulai era kolonial hingga era reformasi saat ini, dan juga menerangkan tantangan sekolah menengah atas menghadapi kondisi abad ke-21 . Buku ini sangat membantu untuk menelusuri kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Buku dari Departemen Pendidikan Nasional berjudul “Kebijakan Pendidikan Nasional”.¹¹ Buku ini menerangkan kebijakan-kebijakan atau strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan program-program pendidikan nasional, guna mengembangkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Buku ini membantu untuk melihat strategi pembangunan untuk pendidikan menengah.

Buku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berjudul “Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat”.¹² Buku ini menerangkan tentang kebijakan dan bentuk-bentuk pendidikan yang pernah ada di Sumatera Barat, di antaranya pendidikan tradisional, pendidikan pengaruh ajaran Hindu dan Budha, pendidikan pengaruh agama Islam, pendidikan masa Kolonial, pendidikan masa pendudukan Jepang, dan pendidikan Indonesia setelah merdeka. Buku ini juga menerangkan latar

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Profil SMA: Sekolah Menengah Atas, Dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2017).

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kebijakan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2003).

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1983).

belakang budaya masyarakat Minangkabau. Buku ini membantu dalam penulisan guna melihat beragamnya kebijakan dan bentuk pendidikan di daerah Sumatera Barat.

Buku dari Muhammad Rifa'i berjudul "Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern".¹³ Buku ini menjelaskan tentang kebijakan-kibijakan yang di terapkan di Indonesia saat sebelum adanya penjajahan di Nusantara atau Indonesia sampai zaman reformasi. Pendidikan masa klasik dikelola oleh masyarakat, atau komunitas yang dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, budaya, agama, dan kepercayaan masing-masing. Pendidikan zaman penjajahan dimaksudkan untuk menyebarkan kepercayaan, kebudayaan, dan tradisinya kepada pribumi, serta mempertahankan kekuasaan kekuasaan. Pendidikan di masa kemerdekaan mulai muncul bersamaan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Tugas utama pendidikan nasional saat itu ialah mengembalikan orientasi dari pendidikan nasional menjadi ideologi pendidikan kebangsaan Indonesia. Pendidikan yang dilakukan pada masa Orde Lama adalah menguatkan dan memperbanyak jenis pendidikan untuk guru dan dilaksanakan program wajib belajar. Pendidikan masa Orde Baru memiliki ciri dengan kebijakan pendidikannya dikaitkan dengan persoalan pembangunan dan ekonomi. Kebijakan pendidikan masa reformasi ialah diterapkannya otonomi daerah dan otonomi lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi.

Skripsi yang ditulis oleh Sarta Anketi M. Berjudul "Dari SPG Negeri Painan ke SMA Negeri 2 Painan: Sejarah Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota

¹³ Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

Painan Tahun 1961-2015”.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Sekolah Pendidikan Guru Negeri Painan dan menjelaskan alasan dialih fungsikan menjadi SMA Negeri 2 Painan. Serta menjelaskan perkembangan SMA Negeri 2 Painan sebelum dan sesudah pergantian nama. Alasan dialih fungsikan ialah faktor umur yang dianggap belum mampu menjadi tenaga guru yang profesional, keluarnya Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan pada tahun 1991 tenaga guru tidak lagi disiapkan SPG melainkan disiapkan oleh perguruan tinggi. Skripsi tersebut dijadikan sebagai acuan penulisan skripsi ini untuk melihat konsep penulisan suatu lembaga pendidikan.

Skripsi dari Dio Prasetya berjudul “Pengurusan Perizinan Sekolah Filial Oleh Dinas Pendidikan Di Kota Padang”, dengan studi kasus SMKN 3 Padang dan SMPN 13 Padang.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan perizinan sekolah filial tingkat SMP menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan pada tingkat sekolah menengah umum atau kejuruan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. Sekolah filial atau kelas jauh merupakan bagian dari pendidikan formal yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pelayanan khusus. Pendidikan layanan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

¹⁴ Sarta Anketi M, Dari SPG Negeri Painan ke SMA Negeri 2 Painan: Sejarah Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Painan Tahun 1961-2015, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, 2017).

¹⁵ Dio Prasetya, Pengurusan Perizinan Sekolah Filial Oleh Dinas Pendidikan di Kota Padang, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018).

Pendidikan Layanan Khusus. Dalam hal pengawasan sekolah filial dilakukan oleh kepala sekolah induk dan diawasi juga oleh Dinas Pendidikan. Proses perizinan dan konsep sekolah filial yang ditulis di dalam skripsi tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan tinjauan tentang studi di atas, penulis ingin mengkaji tentang SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. Tema ini penting untuk diteliti karena selain belum ada yang menuliskannya, penelitian ini memfokuskan perkembangan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang dari sekolah filial SMA Negeri 1 Bukittinggi. Kemudian sekolah ini menjadi sekolah induk, dan juga berhasil menjadi sekolah rujukan.

E. Kerangka Analisis

Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu.¹⁶ Penelitian ini menerangkan sejarah institusi atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana terjadinya proses pendidikan yang berkesinambungan guna membentuk manusia yang bermoral dan membawa ke arah masa depan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa lembaga pendidikan terdiri dari jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, yang terdiri dari

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal merupakan kegiatan pendidikan di luar sekolah, umumnya tidak ada tingkatan kelas, dan tidak dibedakan atas dasar usia sehingga dalam suatu kegiatan belajar terdapat anak-anak, orang dewasa dan orang tua yang mempunyai kebutuhan untuk belajar. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dikelola dengan sifat kekeluargaan, memberikan nilai keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan nilai keterampilan.¹⁷

Sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan semua sumber daya secara selektif, efektif dan efisien karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya.¹⁸ Sekolah merupakan sarana pendidikan formal, menjadi penghasil individu yang berperadaban dan berkemampuan secara intelektual dan kecakapan. Banyak aspek yang kemudian tidak dapat dipenuhi pendidikan di lingkungan keluarga, tetapi dapat dipenuhi melalui pendidikan sekolah, misalnya dalam hal pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan.¹⁹ Oleh sebab itu sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga yang bertugas membantu lingkungan keluarga mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperluas wawasan dan tingkah laku anak sesuai dengan tatanan nilai dan norma yang ditetapkan.

¹⁷ Durotul Yatimah, *Landasan Pendidikan*, (Jakarta: Aluma dan Mandiri, 2017), hlm. 4-5.

¹⁸ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 52.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 53.

SMA pada hakikatnya merupakan satuan pendidikan yang berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan bersifat umum. Maksud pendidikan bersifat umum ini ialah pendidikan yang menyediakan kurikulum dengan sejumlah bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan pemikiran rasional dan kemampuan intelektual siswa. Melalui pendidikan umum, peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menggali, mengolah, dan menggunakan informasi yang dimuat dalam berbagai bahan kajian dan pelajaran melalui pemikiran dan diskusi rasional.²⁰

Penelitian ini juga termasuk ke dalam kajian sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan ialah uraian yang sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan pendidikan pada waktu yang lampau.²¹ Sejarah pendidikan termasuk dalam studi sejarah sosial karena sejarah sosial merupakan gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu kelompok atau komunitas dengan ruang lingkup kehidupannya seperti kehidupan keluarga beserta pendidikannya, gaya hidup yang meliputi pakaian, perumahan, makanan, perawatan kesehatan dan sebagainya.²²

Esensi dari pendidikan itu sendiri sebenarnya ialah pengalihan (tranmisi) kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide dan nilai-nilai spiritual serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap

²⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Profil SMA: Sekolah Menengah Atas, Dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2017), hlm. 3.

²¹ Rahma Fitria, *SMKN 3 Padang: Perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang (1969-2007)*, *Skripsi*, (Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, 2009), hlm. 6.

²² Sartono Kartodirdjo, *op.cit*, hlm. 50.

masyarakat atau bangsa.²³ Dalam GBHN telah dirumuskan tentang pendidikan yaitu pendidikan sebagai suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga sikap keterampilan individu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga.²⁴

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Sebagaimana kajian sejarah pada umumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lalu guna memperoleh konstruksi aktifitas manusia tersebut pada masa lampau.²⁵ Dalam metode sejarah ada empat langkah prosedur kerja, yaitu heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi atau menafsirkan, dan penulisan laporan atau historiografi.

Tahap awal penelitian ini ialah pengumpulan sumber berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama yang akan digunakan, yaitu arsip dan dokumen SMA Negeri 1 Tilatang Kamang berupa akta notaris Yayasan Tuanku Nan Renceh, surat-surat keputusan Dinas Pendidikan, surat penyerahan tanah dan sertifikat tanah, data guru dan siswa, laporan perkembangan sekolah dan data lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu digunakan

²³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm 259.

²⁴ M. Fachri Adnan, Hubungan Pendapatan dan Pendidikan dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada Pedesaan Miskin di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, *Laporan Penelitian*, (IKIP Padang, 1995), hlm. 7.

²⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

juga sumber lisan berupa wawancara, diantaranya: kepala sekolah Willia Zuwerni, S.Pd., M.Si.; Dra. Netri, Mardiatris, dan Dra. Desmirini sebagai staf pengajar; Mansur Kasim, S.H. dan Edi Rahmana, S.Pd. sebagai mantan kepala sekolah; Nurhida, Novia, dan Abi Husni sebagai alumni. Sumber sekunder dari penelitian ini melalui buku-buku yang berkaitan dengan tema yang didapatkan dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

Tahap kedua ialah kritik sumber. Setiap data atau sumber yang didapatkan harus melalui tahap ini guna menguji keabsahan sumber tersebut. Kritik sumber terdiri dari dua, yaitu kritik dan kritik intern. Kritik ekstern ialah pengujian sumber berdasarkan keaslian dan keabsahan wujud sumber, dan kritik intern ialah pengujian sumber berdasarkan kredibilitas isi sumber tersebut.

Tahap ketiga ialah interpretasi. Interpretasi merupakan menafsirkan atau menganalisis sumber-sumber yang didapatkan pada tahap kritik sumber. Interpretasi bertujuan untuk menandakan bahwa sumber yang didapatkan bisa saling terkait satu sama lain yang menciptakan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-hukum metode sejarah.²⁶ Tahap terakhir yaitu historiografi, yaitu fakta sejarah yang telah diinterpretasi kemudian dipaparkan secara terstruktur menjadi satu kesatuan karya sejarah.

²⁶ *Ibid*, hlm. 96.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang mencakup sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kondisi Kecamatan Tilatang Kamang. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu pertama tentang kondisi sosial dan pemerintahan Kecamatan Tilatang Kamang, kedua tentang kondisi perekonomian, dan ketiga tentang kondisi pendidikan masyarakat Tilatang Kamang.

Bab III membahas tentang proses SMA Negeri 1 Tilatang Kamang menjadi sekolah yang mandiri. Bab ini terbagi tiga sub bab, yaitu pertama tentang Yayasan Tuanku Nan Renceh, kedua tentang proses filial dari SMA Negeri 1 Bukittinggi hingga menjadi sekolah yang mandiri, dan ketiga tentang SMA Negeri 1 Tilatang Kamang sebagai sekolah induk.

Bab IV membahas tentang perkembangan SMA Negeri 1 Tilatang Kamang, yang terbagi menjadi lima sub bab, yaitu pertama tentang kepala sekolah, kedua tentang guru dan siswa, ketiga tentang kurikulum, keempat tentang perkembangan sarana dan prasarana, dan kelima tentang prestasi sekolah.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab satu sampai bab akhir.